

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat demokratisasi dan kesetaraan gender di suatu negara. Di era demokrasi modern, representasi perempuan dalam politik menjadi sorotan penting. Meskipun perempuan merupakan separuh dari populasi, mereka masih terwakili secara kurang memadai dalam struktur pengambilan keputusan, termasuk di lembaga legislatif. Menurut *United Nations Women* (2023), keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya mendukung hak-hak perempuan, tetapi juga memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

Berbicara mengenai konteks Indonesia, telah ada kebijakan afirmatif mengenai partisipasi perempuan seperti kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen melalui Undang – Undang Pemilu. Menurut Didik Supriyanto (2024), ketika memberikan keterangan di sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagai ahli yang menjabarkan basis perhitungan persentase 30% keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi oleh partai politik peserta Pemilu 2024.

Perempuan memerlukan ruang publik untuk hadir di arena politik melalui kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota berdasarkan gender. Hal ini dilakukan guna menjamin kesetaraan penuh antarwarga negara. Oleh karena itu, berpedoman pada Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), maka kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% calon perempuan harus dijalankan secara konsisten demi meningkatkan jumlah perempuan di parlemen.

Sejauh ini hasil pemilu legislatif jauh dari model perwakilan deskriptif karena jumlah anggota parlemen perempuan tak sebanding dengan jumlah penduduk perempuan. Didik juga menerangkan bahwa sejak Pemilu 1999, upaya guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik telah dilakukan, misalnya

berdasarkan ketentuan Undang- Undang Partai Politik, yakni UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 13 Ayat 3 yang berbunyi “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.” serta UU 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan. dan ayat 5 yang berbunyi “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.”

Selain itu, ada pula dalam UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 65 ayat (1) “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”, UU 10 tahun 2008, UU 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 55, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.” dan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 245, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”.

Partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan. Data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, persentase perempuan yang lolos kursi DPR RI mencapai 22,1 %, yaitu 128 orang. Angka ini masih jauh dari target kuota 30% juga menjadi cerminan adanya hambatan secara struktural dan kultural yang dihadapi caleg perempuan.

Meski begitu, persentase ini tampak terus meningkat, jika ditilik sejak pemilu 1999. Pada pemilu 1999 jumlah anggota DPR perempuannya hanya di angka 45 orang, atau 9% saja. Peningkatan lebih dari 2 kali lipat terjadi di Pemilu

2009, dengan jumlah 101 perempuan, atau setara 18%. Peningkatan persentase pada tidak terjadi pada pemilu 2014 kursi perempuan hanya mendapatkan 97 kursi atau 17,3%, kemudian grafik tersebut mengalami peningkatan pada pemilu 2019 dengan terdapat 118 kursi anggota DPR perempuan atau setara 20,5% dari total kursi yang ada.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi caleg perempuan adalah stereotip gender yang menganggap bahwa politik merupakan ranah laki-laki. Selain itu, caleg perempuan seringkali menghadapi keterbatasan akses sumber daya, seperti dana kampanye dan dukungan politik. Meskipun demikian, beberapa caleg perempuan berhasil memanfaatkan media sosial, membangun jaringan yang kuat, dan mengusung isu-isu yang dekat dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

Pemenangan calon legislatif (caleg) perempuan di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks pemberdayaan gender dan demokrasi. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik, tantangan masih banyak, seperti stereotip gender, kekerasan berbasis gender, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Oleh karena itu, strategi pemenangan caleg perempuan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat terbatas di banyak negara, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Representasi perempuan di parlemen dan posisi-posisi penting lainnya masih rendah, baik dalam negara berkembang maupun negara maju. Salah satu alasan utamanya adalah norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan dalam politik (*Inter-Parliamentary Union* : 2020)

Pippa Norris (2019) menerangkan dalam bukunya yang berjudul “*Women and Political Power in the 21st Century*” bahwasanya tantangan secara struktural dan sosial yang dihadapi perempuan ketika ingin terlibat dalam politik dikarenakan banyak masyarakat masih memegang norma tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hierarki sosial. Hal tersebut menjadi hambatan utama ambisi perempuan di arena politik.

Kekerasan berbasis gender juga seringkali terjadi dalam prosesi penyelenggaraan arena politik, baik dikalangan kandidat calon, penyelenggara hingga pemilih. United Nations Women (2024) dalam laporannya "*Violence against Women in Politics*" menerangkan bahwa perempuan yang terlibat dalam politik seringkali menghadapi kekerasan verbal maupun non verbal. Di Indonesia, Bawaslu pada Pemilu dan Pilkada 2024 juga memberikan laporan terkait insiden-insiden kekerasan terhadap perempuan dalam kontestasi politik temuan yang dilaporkan adalah adanya kekerasan berbasis gender terhadap calon kandidat perempuan dan juga pemilih perempuan yang telah janda atau tidak memiliki suami serta penyelenggara perempuan.

Menurut Pamela Paxton dan Melanie M. Hughes (2019) dalam bukunya "*Women, Politics, and Power: A Global Perspective*" menjelaskan bahwa berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, termasuk diskriminasi struktural, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya akses terhadap jaringan politik. Diskriminasi struktural terjadi dalam internal partai politik, perempuan cenderung memiliki akses yang terbatas pada sumber daya finansial serta jaringan politik yang dapat mendukung mereka dalam berkandidat pada politik praktis.

Di konteks politik elektoral Indonesia, caleg perempuan seringkali tidak hanya berhadapan dengan hambatan berbasis gender. Mereka juga harus menavigasi persimpangan identitas yang jauh lebih kompleks melalui lensa Interseksionalitas. Interseksionalitas adalah kerangka analitis yang menunjukkan bagaimana berbagai kategori identitas seperti gender, status politik (petahana/non-petahana), dan geografi (putra daerah/non-putra daerah) saling tumpang tindih (intersect) dan berinteraksi untuk menciptakan pengalaman subordinasi yang unik dan berlapis.

Analisis interseksional menolak kerangka sumbu tunggal (single-axis framework) dan sebaliknya menyoroti beban berlapis (multiply-burdened) yang dialami oleh individu di persimpangan identitas. Dalam studi kasus ini, hambatan interseksional yang dihadapi caleg perempuan dapat dirinci sebagai berikut, gender dan status politik (non-petahana), caleg perempuan non-petahana (seperti Amelia Anggraini) memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan jaringan

politik yang didominasi oleh laki-laki petahana. Status non-petahana menciptakan kerentanan ganda, menuntut kandidat untuk membangun strategi kemenangan yang sangat terstruktur dan berjangka panjang. Gender dan geografi (non-putra daerah), sentimen primordialisme yang dominan di Indonesia membuat kandidat perempuan yang bukan merupakan putra daerah menghadapi tantangan elektoral yang signifikan, di mana status sebagai perempuan beririsan dengan citra sebagai “orang luar”. Hambatan ini harus diatasi dengan narasi baru yang melampaui batas-batas geografis.

Gender dan agama/kultural, caleg perempuan rentan menjadi target serangan yang menggunakan stereotip budaya dan agama sebagai domain hegemonik, untuk mendelegitimasi (Collins, 2000). Serangan seringkali tidak berfokus pada kapasitas, melainkan pada identitas religius, seperti isu hijab atau latar belakang keagamaan, yang digunakan untuk menyebarkan kampanye hitam di basis pemilih yang sensitif. Kompleksitas hambatan interseksional inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pentingnya strategi khusus untuk membongkar glorifikasi gender dalam ranah politik praktis tentunya perlu untuk dirumuskan dan diperdalam guna mengurai permasalahan yang kompleks dalam demokratisasi gender pada pemilu di Indonesia.

Meskipun terdapat kebijakan kuota gender yang telah diterapkan di Indonesia pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan menyertakan paling sedikit 30% pada pasal 245 yang menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” guna meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terkadang kuota tersebut hanyalah formalitas, perempuan yang terpilih tetap menghadapi tantangan untuk mendapatkan pengaruh politik yang signifikan. Pada zaman modern ini tentunya kesetaraan gender itu sudah keniscayaan hal ini tidak bertujuan untuk mengancam dominasi laki-laki, namun untuk keseimbangan peran yang nantinya akan bermuara pada penguatan demokrasi.

Permasalahan yang dihadapi perempuan dalam politik praktis dan demokratisasi gender sangatlah kompleks. Adanya kebijakan seperti penerapan

kuota gender dalam politik adalah suatu langkah alternatif untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam politik. Permasalahan secara struktural dan kultural menjadi komponen yang perlu dibongkar agar pada ranah politik praktis perempuan tetap dapat berdaya tanpa memandang status gender yang sifatnya kodrati.

Kemudian yang perlu menjadi gagasan adalah bagaimana langkah taktis dalam membongkar permasalahan tersebut, sehingga perlu diidentifikasi dari hal yang bersifat *fundamental problem* yang selanjutnya bermuara pada ranah strategi dan taktis calon perempuan pada arena politik. Pentingnya strategi khusus untuk membongkar glorifikasi gender dalam ranah politik praktis tentunya perlu untuk dirumuskan dan diperdalam guna mengurai permasalahan yang kompleks dalam demokratisasi gender pada pemilu di Indonesia.

Salah satu konteks daerah pemilihan yang menarik untuk diteliti yaitu pada pemilihan legislatif 2024, berdasarkan ketetapan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah DPR RI meliputi (Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara) dengan alokasi sebanyak tujuh kursi. Dari total 7 kursi yang diperebutkan hanya terdapat satu perempuan saja yang berhasil lolos menuju kursi senayan, yaitu atas nama Amelia Anggraini dari Partai Nasdem yang berhasil meraih suara tertinggi (*by name*) di dapil Jawa Tengah VII dengan meraih 131.481 suara.

Tentunya sebagai satu-satunya perempuan yang berhasil lolos di dapil tersebut bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, kompetitornya dalam satu dapil terdiri dari para petahana dan politisi senior, sebut saja Bambang Soesatyo atau lebih akrab dikenal dengan Bamsoet dari Partai Golkar. Beliau merupakan telah menjadi anggota DPR RI sejak 2009 tanpa terputus perodesasinya dan kembali mendapatkan kursi pada pemilu 2024. Karier tertingginya pada periode 2019-2024 diamanahkan menjadi Ketua MPR RI, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto pada 2018 hingga 2019. Tentunya sosok tersebut memiliki jaringan sumber daya dan modal sosial yang terstruktur.

Selain Bamsoet juga terdapat nama Utut Adianto yang juga menjadi kompetitor Amelia Anggraini di Dapil VII Jawa Tengah. Seorang Grand Master Catur yang mendunia juga sosok politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mendapatkan kursi selama 4 periode sejak pemilu 2009 di dapil yang sama. Beliau merupakan Ketua Fraksi PDIP Periode 2024-2029 yang juga merangkap sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelejen. Tentunya dia memiliki bekal akses, jaringan, dan modal sosial yang telah mengakar.

Adapun nama yang tergeser tidak mendapatkan kursi kembali di pemilu 2024 dari Fraksi PDIP atas nama Heru Sudjarmoko yang merupakan politisi senior mengawali karir politiknya sebagai Wakil Bupati Purbalingga Periode 2005-2010 yang kemudian berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2010 menjadi Bupati Purbalingga. Puncak karier politiknya di lembaga eksekutif menjadi seorang Wakil Gubernur Jawa Tengah mendampingi Ganjar Pranowo periode 2013-2018, beliau juga sempat menjadi pelaksana tugas selama 4 bulan menjelang akhir masa jabatannya.

Pada pemilu legislatif 2019 Heru Sudjarmoko berhasil meraih kursi DPR RI Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara. Namun, pada pileg 2024 namanya tergeser dari alokasi kursi dan gagal melanggengkan kekuasaannya. Heru Sudjarmoko bukanlah satu-satunya nama yang tergeser di dapil tersebut. Adapun nama Lasmi Indaryati dari Partai Demokrat yang merupakan sosok politisi perempuan juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024. Lasmi Indaryati juga merasakan betapa dinamisnya kondisi politik di Dapil VII Jawa Tengah, situasi dinamis tersebut yang mengakibatkan dia tidak berhasil mempertahankan kursinya di pemilu 2024.

Amelia Anggraini dari Partai Nasdem bukanlah nama baru di Dapil DPR RI VII Jawa Tengah, dia pernah mendapatkan kursi di dapil tersebut pada pemilu 2014 yang kemudian menghantarkan namanya di Senayan menjadi anggota Komisi IX DPR RI Periode 2014-2019, ketika pemilu 2019 Amelia Anggraini tidak berhasil mempertahankan elektabilitasnya di dapil tersebut sehingga namanya tidak lolos menjadi Anggota DPR RI. Pemilu 2019 menjadi ajang refleksi dan evaluasi bagi

Amelia Anggraini dan Tim karena hasil yang tidak memuaskan. Berkat sikap optimisme dan pantang menyerah dalam berusaha Pemilu 2024 menjadi titik balik bagi seorang Amelia Anggraini yang menjadikannya satu-satunya caleg perempuan yang terpilih di Dapil DPR RI Jawa Tengah VII dengan perolehan suara caleg tertinggi mengalahkan petahana dan politisi senior yang satu dapil dengannya.

Amelia Anggraini juga bukanlah seorang putra daerah asli Jawa Tengah, dia dilahirkan dari Bumi Rafflesia atau Provinsi Bengkulu Pulau Sumatera. Sempat mengenyam pendidikan di Bengkulu pada saat Sekolah Dasar dan tumbuh besar di Jambi pada masa sekolah menengah selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Negeri Jiran, di Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor. Tentunya bukan perkara mudah bagi seorang politisi yang notabnya bukanlah seorang putra daerah dan perempuan.

Hal tersebut tentunya menjadi salah satu prestasi bagi kaum perempuan dalam konteks demokrasi gender. Tentunya studi kasus tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dipelajari terkait bagaimana kiat-kiat pertarungan perebutan kursi di tengah hiruk pikuk persaingan yang cukup ketat, juga dapat menjadi motivasi dan teladan bagi perempuan lain untuk dapat berdaya di tengah stereotip masyarakat yang masih memandang sebelah mata kaum perempuan.

Amelia Anggraini merupakan salah satu calon anggota legislatif perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 di daerah pemilihan Jawa Tengah VII (Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara). Sebagai seorang caleg perempuan, ia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh dukungan pemilih, mengingat budaya patriarki masih dominan di banyak daerah di Indonesia. Berada pada dapil yang dapat dibilang memiliki ragam karakteristik sosial dan politik sekaligus memiliki dinamika yang unik, kendatipun, Amelia Anggraini bukanlah seorang petahana tetapi bukan pula orang baru di Dapil VII Jawa Tengah, hal ini dipandang perlu melakukan pendekatan strategis politis agar dapat sukses meraih suara pemilih di dapil neraka. Berikut ini adalah hasil perolehan suara caleg di dapil Jawa Tengah VII yang lolos kursi parlemen.

Tabel 1. 1 Perolehan Suara DPR RI Dapil Jawa Tengah VII
Perolehan Suara DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

No.	Nama (Partai)	Perolehan Suara
1.	Amelia Anggraini (Nasdem)	131.481
2.	Rofiq Hananto (PKS)	126.658
3.	Utut Adianto (PDIP)	116.794
4.	Taufiq R. Abdullah (PKB)	116.179
5.	Bambang Soesatyo (Golkar)	80.468
6.	Aqib Ardiansyah (PAN)	64.934
7.	Darori Wonodipuro (Gerindra)	62.152

Sumber: jdih.kpu.go.id (tabel diolah oleh penulis)

Berdasarkan perolehan suara pada tabel 1.1 (*by name*) caleg atas nama Amelia Anggraini satu-satunya caleg perempuan yang berhasil lolos kursi parlemen dengan mendapatkan perolehan suara tertinggi di dapilnya. Tentunya hasil perolehan suara tersebut tidaklah didapat dengan instan, akan tetapi menggunakan strategi dan persiapan yang matang.

Berbicara mengenai konteks peta politik pemilu legislatif di Jawa Tengah, Amelia Anggraini mencatatkan namanya menjadi caleg dengan perolehan suara tertinggi urutan 13 dari total 77 alokasi kursi DPR RI di Dapil Jawa Tengah yang tersebar dari 10 Daerah Pemilihan. Urutan pertama dihuni oleh cucu dari Presiden

RI Pertama Soekarno yang juga merupakan anak kandung dari Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yaitu Puan Maharani dengan perolehan suara 297.366 suara di Dapil V (Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Kota Surakarta) DPR RI Jawa Tengah.

Tabel 1. 2 Caleg DPR RI Jawa Tengah dengan Perolehan Suara Tertinggi

15 Caleg DPR RI Jawa Tengah dengan Perolehan Suara Tertinggi			
No.	Nama	Fraksi	Jumlah Suara
1	Puan Maharani	PDIP	297.366
2	Nusron Wahid	Golkar	204.248
3	Shanty Alda Nathalia	PDIP	196.355
4	Ashraff Abu	Golkar	177.436
5	Sudjadi	PDIP	169.106
6	Novita Wijayanti	Gerindra	163.920
7	Doni Akbar	Golkar	154.476
8	Adik Sasongko	Gerindra	142.405
9	Haryanto	PDIP	135.086
10	Kaisar Kiasa Kasih Said Putra	PDIP	132.872
11	Adisatrya Suryo Sulisto	PDIP	132.482
12	Wastam	Demokrat	131.643
13	Amelia Anggraini	Nasdem	131.481
14	Fathan	PKB	130.135
15	Dede Indra Permana Soediro	PDIP	130.131

Sumber: berita acara KPU nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024
(Tabel diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dari total 15 nama caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, hanya terdapat 4 caleg perempuan yang berhasil mencatatkan namanya. Artinya persentase gender yang masuk dalam nama 15 Caleg DPR RI Jawa Tengah dengan perolehan suara tertinggi berjumlah 26,67 % perempuan dan sisanya merupakan laki-laki. Meskipun belum mencapai jumlah persentase afirmasi 30 % perwakilan perempuan, akan tetapi dalam papan percaturan politik Jawa Tengah suara tertinggi diraih oleh seorang perempuan (Puan Maharani) yang latar belakangnya telah penulis jelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil perolehan suara caleg Partai Nasdem di Jawa Tengah Amelia Anggraini yang notabene bukanlah seorang petahana tetapi bukan pula orang baru juga menorehkan perolehan suara tertinggi di Partai Nasdem itu sendiri. Dari total 10 Dapil yang ada di Jawa Tengah Partai Nasdem memperoleh 7 Kursi DPR RI dengan Dapil yang berbeda. Detail selengkapnya terdapat pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Perolehan Suara Caleg DPR RI Terpilih Partai Nasdem Dapil Jawa Tengah.

Sumber: Postingan Instagram official_nasdem pada 17 Maret 2024

(berdasarkan rapat rekapitulasi nasional KPU RI)

Konteks demokrasi gender menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Demokrasi gender mengacu pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam partisipasi politik bagi seluruh kelompok, khususnya bagi seorang perempuan. Meskipun secara teori demokrasi menjamin hak politik yang setara bagi seluruh warganya, faktanya perempuan seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan dalam mengakses kekuasaan politik. Hambatan ini bisa berupa diskriminasi secara struktural, stereotip gender, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan jaringan politik yang didominasi oleh laki-laki (Setiawan, 2014)

Menurut Tanuwijaya (2016), meskipun Indonesia telah mengatur kuota minimal 30% bagi perempuan dalam struktur legislatif, pada kenyataannya perempuan masih kesulitan untuk memperoleh posisi strategis dalam politik. Kuota perempuan ini bertujuan untuk meningkatkan representasi politik perempuan, namun implementasinya seringkali terkendala.

Pada kesetaraan gender dalam konteks politik dan demokrasi. Demokrasi gender berusaha menjelaskan pentingnya keadilan gender dalam sistem politik, yang mengakui hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan politik. (Tanuwijaya, 2016). Dalam konteks ini, teori demokrasi gender akan digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi pemenangan caleg perempuan dapat meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses ruang politik yang didominasi oleh laki-laki.

Hal membahas terkait kesetaraan gender bagaimana kesetaraan gender diterapkan dalam pemilu dan bagaimana perempuan dapat memiliki akses yang setara untuk terlibat dalam politik. Menganalisis hambatan sosial, budaya, dan struktural yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam politik. Kemudian menilik upaya peningkatan representasi perempuan melalui kebijakan kuota legislatif yang diterapkan dalam pemilu.

Partisipasi politik berfokus pada bagaimana individu atau kelompok berperan dalam kegiatan politik, baik dalam bentuk pemilu, pembuatan kebijakan, atau bentuk partisipasi lainnya. (Norris, 2004) Dalam konteks ini, teori partisipasi politik akan digunakan untuk memahami bagaimana caleg perempuan seperti Amelia Anggraini, terlibat dalam proses politik dan bagaimana strategi yang diterapkan guna mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, khususnya perempuan, dan generasi muda. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi kampanye mempengaruhi partisipasi pemilih, khususnya perempuan dan menelaah bagaimana strategi yang diterapkan oleh caleg perempuan untuk menggerakkan pemilih agar memilih atau mendukung kandidat calon perempuan.

Menurut Campbell pola tinggi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kontestasi pemilu ditentukan oleh beberapa faktor yaitu a) political stimulation atau

rangsangan politik yang berarti sejauh mana individu merasa terdorong untuk memperhatikan, membicarakan, atau terlibat dalam aktivitas politik karena adanya momentum tertentu, hal ini terjadi cenderung fluktuatif berdasarkan momentum jika mengutip bahasa dari Campbell yaitu surge/high atau decline/low, b) political interest atau minat politik sejauh mana seseorang tertarik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia politik, dan c) political identification atau identifikasi politik yaitu sejauh mana seseorang merasa dirinya terikat atau memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu.

Ditilik melalui studi perilaku pemilih, khususnya merujuk terhadap pendekatan psikologis dari The American Voter terdapat dua tipe pemilih yaitu Peripheral Voters atau pemilih perifer ialah individu yang memiliki ketertarikan terhadap politik relatif rendah, pemahaman partai politik yang lemah atau bahkan tidak sama sekali, serta tingkat informasi terhadap politik rendah, Core Voters atau pemilih inti ialah individu yang memiliki pengetahuan politik yang tinggi, loyal dan/atau memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu, menunjukkan perilaku partiosan, dan merupakan pemilih yang konsisten mengikuti pemilu. (Campbell et al., 1960, dalam Klein & Rosar, 2017, hlm. 690)

Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam politik kontemporer, terutama dalam menghubungkan politisi dengan pemilih muda (Howard & Hussain, 2013). Teori ini digunakan untuk menganalisis peran media sosial dalam strategi kemenangan Amelia Anggraini, serta bagaimana media sosial berperan untuk meningkatkan citra politik, menginformasikan pemilih, dan memobilisasi dukungan. Menurut Howard dan Hussain (2013), media digital telah menjadi alat utama dalam memperkuat gerakan sosial dan politik, terutama ketika melakukan percepatan mobilisasi. Penggunaan media sosial mendorong pemilih agar berpartisipasi dalam pemilu, serta membantu membangun jaringan politik di era digital. (Howard & Hussain, 2013)

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis faktor yang memengaruhi elektabilitas calon perempuan kemudian apa saja yang menjadi hambatan bagi yang dialami sebagai seorang caleg perempuan yang notabnya bukanlah seorang petahana atau *incumbent* serta bagaimana strategi yang diterapkan oleh Amelia

Anggraini untuk memperebutkan kursi di dapil neraka Jawa Tengah VII (Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara) pada pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Amelia Anggraini merancang dan menerapkan strategi pemenangannya di Dapil Jawa Tengah VII pada Pemilu 2024 untuk meraih suara caleg tertinggi?
- b) Apa hambatan interseksional yang dihadapinya dan bagaimana Amelia Anggraini dan tim mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Mendeskripsikan dan menganalisis rancangan serta implementasi strategi kemenangan yang diterapkan oleh Amelia Anggraini dan timnya di Dapil Jawa Tengah VII pada Pemilu 2024.
- b) Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan interseksional yang dihadapi Amelia Anggraini serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam konteks perkembangan demokrasi dan keterlibatan perempuan dalam politik. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Kontribusi terhadap literatur demokrasi elektoral : Penelitian ini akan menambah referensi akademik mengenai strategi kampanye politik, terkhusus untuk caleg perempuan. Hal ini sangat berguna bagi kajian pemilu dan politik perempuan yang masih berkembang di Indonesia. Hasil penelitian dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai keterlibatan perempuan dalam politik dan strategi yang dapat memperkuat posisi mereka dalam kontestasi politik di masa yang akan datang.

- b) Peningkatan partisipasi politik : Penelitian ini memberikan kontribusi kajian ilmu politik, khususnya dalam memperkaya pemahaman tentang teori partisipasi politik. Dengan mengkaji bentuk, pola, dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam konteks tertentu, contohnya : pemilu, keterlibatan caleg perempuan, atau partisipasi pemilih, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat relevansi dan aplikasi teori partisipasi politik dalam studi politik kontemporer.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Caleg Perempuan dan Partai Politik

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan panduan praktis bagi caleg perempuan terutama dalam merancang strategi kampanye yang efektif untuk memenangkan Pemilu. Hal ini termasuk dalam pemilihan isu-isu yang relevan, cara berkomunikasi dengan pemilih, serta pemanfaatan media sosial dan teknologi yang optimal. Partai politik juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang strategi khusus yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, baik dalam rekrutmen maupun dalam kemenangan caleg perempuan.

- b) Masyarakat dan Pemilih

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan pemilih untuk dapat memahami keterwakilan perempuan dalam politik dan bagaimana perempuan dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam kebijakan-kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat membuka wawasan bagi pemilih, terutama perempuan, untuk lebih mendukung calon legislatif perempuan dalam pemilu.

- c) Pemerintah dan Lembaga Penyelenggara serta Pengawas Pemilu

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam penguatan kebijakan yang mendukung partisipasi politik perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan dan program yang lebih inklusif

dan berkeadilan gender untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, baik di ranah legislatif maupun eksekutif.

1.4.3 Manfaat Sosial

Peningkatan kesadaran tentang keterlibatan perempuan dalam politik penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam politik. Dengan menganalisis perjuangan caleg perempuan dan strategi mereka, penelitian ini dapat membantu memperkuat pandangan bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang sama dengan laki-laki ketika menjalankan peran politik dan pengambilan keputusan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai strategi pemenangan dalam kontestasi pemilihan legislatif telah menjadi topik yang banyak diteliti dalam studi ilmu politik di Indonesia. Berbagai penelitian telah mengupas tuntas strategi yang digunakan oleh para calon legislatif (caleg), baik laki-laki maupun perempuan, dalam upaya meraih dukungan suara. Studi-studi sebelumnya secara umum berfokus pada beberapa aspek kunci, seperti strategi komunikasi politik, peran partai politik, manajemen kampanye, pemanfaatan modal sosial dan ekonomi, serta strategi pemenangan di berbagai konteks daerah yang berbeda. Secara umum, penelitian-penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama yang menyoroti berbagai aspek strategi pemenangan, baik untuk kandidat secara umum maupun secara khusus bagi kandidat perempuan.

Tema pertama yang menonjol adalah pentingnya strategi komunikasi dan pemasaran politik. Penelitian oleh Arifman Ngato, dkk. (2018) menemukan bahwa strategi komunikasi Partai Nasdem di Kabupaten Pulau Morotai berpusat pada upaya mendekatkan dan memperkenalkan caleg serta partai secara langsung maupun melalui media elektronik, dengan memilih figur yang memiliki citra kuat.

Hal ini sejalan dengan studi oleh Jumriani, dkk. (2016) mengenai pemenangan Bupati Indah Putri, yang menekankan efektivitas strategi

pencitraan kandidat, penyusunan pesan yang tepat, dan personal branding. Joni Firmansyah, dkk. (2022) juga memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwa kandidat perempuan di Kabupaten Sumbawa Barat berhasil dengan mempromosikan diri sebagai "produk politik" yang menarik bagi pemilih.

Tema kedua berkaitan dengan kerangka strategi ofensif dan defensif, yang sering digunakan sebagai landasan teori. Kurnia Debora Simanjuntak, dkk. (2024) mengidentifikasi bahwa anggota legislatif perempuan di Sawahlunto menggunakan strategi ofensif seperti pembentukan tim sukses dan sosialisasi program kerja, serta strategi defensif yang mengandalkan jaringan ikatan kekeluargaan dan pendekatan ke masyarakat. Demikian pula, Resty Ardila Efendi (2023) menganalisis bagaimana Partai Golkar di Pekanbaru menerapkan kombinasi strategi ofensif, defensif, dan campuran untuk pemberdayaan dan pemenangan caleg perempuannya.

Tema ketiga yang sangat relevan adalah faktor-faktor unik dalam pemenangan kandidat perempuan. Penelitian oleh Fajar Alan Syahrier & Alva Beriansyah (2024) menunjukkan bahwa seorang calon kepala desa perempuan berhasil mengatasi stereotip gender melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan fokus pada isu pembangunan lokal. Faktor pendorong bagi perempuan untuk terjun ke politik juga beragam, mulai dari rendahnya keterwakilan perempuan, keinginan mengabdikan dukungan keluarga, hingga adanya kebijakan kuota 30% (Studi DPRD Kota Makassar, 2024). Lebih dari itu, faktor eksternal seperti modal sosial, politik, dan ekonomi (Simanjuntak, dkk., 2024) serta ketokohan keluarga atau figur pendukung (Siti Khodijah, 2022) terbukti menjadi penentu kemenangan yang signifikan.

Terakhir, peran manajemen tim dan organisasi menjadi krusial. Studi oleh Firdaui Nuzulla Isnainy & Tenda Aktiva Oktariyanda (2019) menyoroti pentingnya manajemen strategi yang terstruktur, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemenangan seorang kandidat sering kali ditopang oleh kerja tim yang solid dalam membentuk tim, melakukan pemetaan wilayah, dan menjalankan kampanye (Studi DPRD Kota Makassar, 2024;

Jumriani, dkk., 2016). Namun, peran partai politik tidak selalu maksimal dalam membantu setiap calegnya (Feronica Chensie, dkk., 2019).

Meskipun demikian, kajian mengenai strategi pemenangan caleg perempuan dalam studi-studi di atas cenderung belum menggunakan kacamata analitis yang memadai untuk membongkar hambatan berlapis. Analisis yang dibutuhkan adalah kerangka Interseksionalitas, yang berfokus pada irisan berbagai identitas. Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan kerangka ini meliputi, Kimberlé Crenshaw (1989) dalam *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics* mengkonseptualisasikan Interseksionalitas sebagai kerangka yang menolak analisis sumbu tunggal (*single-axis framework*). Penelitian ini menegaskan bahwa opresi atau subordinasi terjadi di persimpangan identitas (misalnya, ras dan gender) yang menciptakan beban berlapis (*multiply-burdened*) yang berbeda dari analisis gender tunggal.

Patricia Hill Collins (2000) dalam *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* mengembangkan konsep Matriks Dominasi (*Matrix of Domination*) yang menjelaskan bagaimana sistem opresi bekerja melalui domain struktural, disipliner, dan hegemonik. Konsep domain hegemonik sangat relevan untuk menganalisis serangan terhadap caleg perempuan yang menggunakan stereotip agama dan budaya untuk mendelegitimasi. Krishna Sen (2002) dalam *The Mega-Malaise of Politics (Women in Indonesia)* studi kasus Megawati Soekarnoputri di Indonesia menunjukkan bagaimana gender seorang kandidat digunakan untuk menolaknya, namun keberhasilannya dinisbikan pada status dinasti politik (putri Soekarno). Hal ini menguatkan argumen bahwa identitas politik di Indonesia selalu dibentuk oleh persilangan gender dengan faktor lain, seperti status politik atau dinasti.

Meskipun demikian, dari penelusuran literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang menjadi justifikasi bagi

urgensi penelitian ini. Pertama, sebagian besar studi mengenai strategi caleg perempuan masih terbatas pada analisis sumbu tunggal atau belum secara eksplisit menerapkan kerangka interseksionalitas untuk membedah strategi pemenangan yang secara sadar merespons hambatan berlapis (gender, status politik, dan geografi). Kedua, meskipun ada beberapa penelitian mengenai caleg perempuan, belum ada yang secara khusus mengangkat studi kasus seorang caleg perempuan non-petahana yang berhasil meraih perolehan suara individu tertinggi di sebuah “dapil neraka” yang kompetitif, mengalahkan para politisi senior dan petahana.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan analisis pada studi kasus Amelia Anggraini di Dapil Jawa Tengah VII pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana kombinasi strategi kampanye (*ofensif-defensif*), mobilisasi sumber daya, dan *candidate effect* diterapkan secara taktis untuk membongkar dan melampaui hambatan interseksionalitas (gender, non-petahana, non-putra daerah) demi meraih kemenangan signifikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi studi yang ada, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai strategi pemenangan caleg perempuan dalam menghadapi tantangan politik kontemporer di Indonesia.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam strategi pemenangan caleg perempuan, dengan fokus pada Calon Anggota Legislatif Perempuan Amelia Anggraini dalam Pemilu 2024 di Dapil Jawa Tengah VII (Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara). Kerangka teori penelitian ini dibangun di atas tiga pilar konseptual utama yang saling berkaitan untuk membedah strategi pemenangan Amelia Anggraini. Ketiga pilar ini akan menjadi alat analisis sentral dalam pembahasan di BAB III. Berikut adalah beberapa kerangka teori yang perlu digunakan dalam penelitian ini:

1.6.1 Interseksionalitas

Teori interseksionalitas adalah sebuah kerangka analitis kritis yang esensial untuk memahami bagaimana berbagai kategori identitas dan sistem kekuasaan, seperti gender, kelas, ras, etnis, agama, dan status politik saling tumpang tindih (*intersect*), berinteraksi, dan saling membentuk untuk (*mutually constitutive*) menciptakan pengalaman subordinasi dan privilese yang unik dan berlapis (Hancock, 2007). Sebagai sebuah paradigma, interseksionalitas menolak secara tegas analisis yang berfokus pada satu sumbu operasi, atau yang disebut Crenshaw (1989) sebagai kerangka sumbu tunggal (*single-axis framework*), karena dianggap gagal menangkap kompleksitas realitas sosial yang dialami oleh individu, terutama mereka yang berada di persimpangan berbagai identitas marginal.

a) Fondasi Konseptual: Dari Persimpangan Identitas ke Matriks Dominasi

Istilah “interseksionalitas” pertama kali diperkenalkan oleh sarjana hukum Kimberle Crenshaw (1989) dalam kritiknya terhadap doktrin hukum antidiskriminasi, teori feminis, dan politik antirasisme yang menurutnya cenderung memperlakukan ras dan gender sebagai kategori saling eksklusif. Akibatnya, pengalaman perempuan kulit hitam sering kali “terhapus” secara teoritis; mereka tidak terwakili dalam diskursus feminisme yang berpusat pada perempuan kulit putih, maupun dalam diskursus antirasisme yang berpusat pada laki-laki kulit hitam (Crenshaw, 1989). Analisis sumbu tunggal ini secara inheren meminggirkan mereka yang mengalami beban berlapis (*multiply-burdened*) karena hanya berfokus pada anggota kelompok yang paling memiliki privilese di dimensi lain (Crenshaw, 1989).

Untuk mengilustrasikan bagaimana sistem hukum gagal mengenali diskriminasi yang bersifat gabungan, Crenshaw membahas kasus *DeGraffenreid v. General Motors*. Dalam kasus ini, gugatan dari lima perempuan kulit hitam ditolak karena pengadilan menolak mengakui “perempuan kulit hitam” sebagai kelas khusus yang dilindungi. Pengadilan

berasalan bahwa perusahaan mempekerjakan perempuan (meskipun mereka kulit putih) dan mempekerjakan orang kulit hitam (meskipun mereka laki-laki), sehingga tidak ada diskriminasi gender ataupun rasial yang dapat dibuktikan secara terpisah (Crenshaw, 1989). Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kerangka hukum yang kaku dan terkotak-kotak membuat penderitaan yang berada di persimpangan menjadi tidak terlihat dan tidak dapat ditindaklanjuti.

Crenshaw (1989), menawarkan analogi persimpangan jalan (*traffic intersection analogy*). Ia mengibaratkan diskriminasi seperti lalu lintas yang datang dari berbagai arah. Jika seseorang mengalami kecelakaan di persimpangan, cederanya dapat disebabkan oleh mobil yang datang dari berbagai arah secara bersamaan. Bagi seorang perempuan kulit hitam “cedera” tersebut dapat berasal dari diskriminasi rasial, diskriminasi gender, dan diskriminasi etnis.

Membangun fondasi dari Crenshaw, sosiolog Patricia Hill Collins (2000) mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan memperkenalkan istilah matriks dominasi (*matrix of domination*). Collins (2000) membedakan antara interseksionalitas, yang merujuk pada bentuk-bentuk spesifik dari opresi yang saling bersilangan (misalnya persilangan ras dan gender), dengan matriks dominasi, yang merujuk pada bagaimana keseluruhan sistem opresi diorganisasi secara sosial. Matriks ini menggambarkan struktur sosial yang kompleks di mana berbagai bentuk penindasan ras, kelas, gender, dan seksualitas saling terkait untuk menopang satu sama lain. Menurut Collins (2000), opresi tidak dapat direduksi menjadi satu jenis fundamental saja, melainkan bekerja bersama-sama dalam menghasilkan ketidakadilan.

Matriks dominasi ini beroperasi melalui empat domain kekuasaan yang saling berkaitan:

1. Domain Struktural: Mengorganisasi dan melembagakan penindasan melalui institusi sosial seperti hukum, pemerintahan, dan ekonomi,

2. Domain Disipliner: Mengelola penindasan melalui praktik birokrasi dan hierarki administratif yang mengatur dan mengontrol kehidupan individu.
3. Domain Hegemonik: Menjustifikasi penindasan melalui ideologi, budaya, dan citra-citra dominan (stereotip) yang menjadikan ketidakadilan tampak wajar dan tak terhindarkan.
4. Domain Interpersonal: Memanifestasikan penindasan melalui interaksi rutin sehari-hari antar individu yang membentuk pengalaman hidup seseorang (Collins, 2000 & Hancock, 2007)

Kerangka matriks dominasi ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan satu bentuk penindasan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan bentuk penindasan lainnya dan menyediakan alat analisis untuk melihat bagaimana kekuasaan beroperasi di berbagai tingkatan secara simultan.

b) Interseksionalitas sebagai Paradigma dan Metodologi Penelitian

Seiring perkembangannya, interseksionalitas telah bertransformasi dari sebuah konsep menjadi sebuah paradigma penelitian yang menantang pendekatan-pendekatan konvensional dalam ilmu sosial (Hancock, 2007; McCall, 2005). Ange-Marie Hancock (2007) mengidentifikasi tiga pendekatan konsep dalam studi mengenai kategori-kategori perbedaan:

1. Pendekatan Uniter (*Unitary Approach*): Berfokus pada satu kategori identitas (misalnya hanya gender) dan menganggapnya sebagai faktor penjelasan utama, dengan asumsi adanya keseragaman dalam kelompok tersebut.
2. Pendekatan Ganda (*Multiple Approach*): Mengakui adanya beberapa kategori, namun memperlakukannya sebagai variabel yang terpisah dan dapat ditambahkan (misalnya, menganalisis “ras+gender”). Pendekatan ini gagal menangkap bagaimana kategori-kategori tersebut saling membentuk secara konstitutif.
3. Pendekatan Interseksional (*Intersectional Approach*): Mengakui bahwa kategori-kategori seperti ras, kelas, dan gender saling berinteraksi secara

dinamis. Hubungan antar kategori ini tidak ditentukan secara a priori, melainkan menjadi sebuah pertanyaan empiris yang terbuka untuk diteliti. (Hancock, 2007)

Sebagai sebuah paradigma, interseksionalitas menolak logika politik identitas yang menyamakan “kesatuan kelompok” dengan “keseragaman kelompok” dan sebaliknya menekankan adanya keragaman intrakategori (*intra category diversity*) yang signifikan (Hancock, 2007). Sejalan dengan hal ini, Leslie McCall (2005) menguraikan tiga pendekatan metodologis utama untuk kompleksitas interseksionalitas:

1. Kompleksitas Antikategoris

Pendekatan ini mendekonstruksi kategori-kategori analitis itu sendiri, menganggapnya sebagai fiksi sosial yang terlalu menyederhanakan realitas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana kategori-kategori ini justru menghasilkan ketidaksetaraan. (McCall, 2005)

2. Kompleksitas Intrakategoris

Pendekatan ini berfokus pada kelompok-kelompok sosial tertentu yang berada pada titik-titik persimpangan yang selama ini terabaikan. Dengan mempelajari pengalaman mereka secara mendalam (misalnya melalui studi kasus), peneliti bertujuan untuk mengungkap kompleksitas dan keragaman di dalam satu kategori. (McCall, 2005)

3. Kompleksitas Interkategoris

Pendekatan ini secara strategis menggunakan kategori-kategori yang ada untuk mendokumentasikan hubungan ketidaksetaraan antar kelompok sosial. Pendekatan ini bersifat komparatif secara sistematis untuk memetakan bagaimana konfigurasi ketidaksetaraan berubah di sepanjang dimensi yang beragam. (McCall, 2005)

c) Relevansi Interseksionalitas dalam Konteks Indonesia: Gender, Politik, dan Agama

Meskipun lahir dari konteks perjuangan feminisme kulit hitam di Amerika Serikat, kerangka analisis interseksionalitas memiliki relevansi yang kuat untuk memahami dinamika politik dan sosial di Indonesia. Identitas seorang kandidat politik di Indonesia tidak pernah tunggal. Ia dibentuk oleh persilangan antara gender, kelas sosial, afiliasi keagamaan, etnisitas atau status kedaerahan (putra daerah vs pendatang), dan jejaring politik atau dinasti.

Kasus Megawati Soekarnoputri, sebagaimana dianalisis oleh Krishna Sen (dalam Robinson & Bessell 2002) menjadi contoh nyata bagaimana interseksionalitas beroperasi dalam politik Indonesia. Ketika ia menjadi kandidat presiden yang paling potensial pada tahun 1999, gendernya digunakan sebagai argument untuk menolaknya, dengan narasi bahwa seorang perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Namun, ketika ia akhirnya berhasil menjadi presiden, gendernya seolah dikesampingkan, dan keberhasilannya dinisbikan sebagai hasil dari statusnya sebagai putri Soekarno. Ini menunjukkan bagaimana kategori gender beririsan dengan kategori dinasti politik dan dimanipulasi secara strategis oleh elit politik untuk melegitimasi atau mendelegitimasi seorang kandidat (Sen, 2002).

Selain itu, persilangan antara gender dan agama menjadi sangat krusial di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Pemikiran feminis Islam, seperti yang digagas oleh Fatima Mernissi, menawarkan lensa yang relevan. Mernissi berargumen bahwa banyak interpretasi teks suci yang menomorduakan perempuan bukanlah ajaran Islam yang inheren, melainkan produk dari sejarah dan budaya patriarkal yang memanipulasi agama untuk kepentingan kekuasaan laki-laki (Shahin, 2024). Ia melakukan pembacaan ulang sejarah Islam untuk kepentingan kekuasaan laki-laki (Shahin, 2024). Ia melakukan pembacaan ulang terhadap sejarah Islam untuk menemukan kembali peran-peran politik perempuan yang telah “dilupakan” (*The Forgotten Queens of Islam*),

menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah sesuatu yang asing dalam tradisi Islam (Shahin,2024).

Crenshaw, 1989; Collins, 2000) digunakan untuk menganalisis bagaimana persimpangan identitas Amelia Anggraini (sebagai perempuan, non-petahana, dan non-putra daerah) menciptakan hambatan berlapis sekaligus membuka peluang strategis. Dalam konteks penelitian ini, teori interseksionalitas menjadi alat analisis yang sangat kuat.

Kemanganan Amelia Anggraini tidak dapat dipahami hanya dengan melihatnya sebagai ‘caleg perempuan’ (analisis uniter) atau sebagai perempuan dan non petahana (analisis ganda). Sebaliknya, strateginya harus dianalisis sebagai respons terhadap posisi interseksionalnya yang kompleks: seorang perempuan yang harus melawan stereotip gender; seorang non-petahana yang berjuang melawan dominasi sumber daya para petahana; dan seorang buka putra daerah yang harus mengatasi bias primordialisme. Posisi-posisi ini secara simultan menciptak hambatan berlapis sekaligus membuka peluang strategis yang unik, yang akan dibedah secara mendalam dalam penelitian ini.

1.6.2 Mobilisasi Sumber Daya

Menganalisis dinamika strategi kemenangan caleg perempuan kiranya perlu untuk menggunakan sudut pandang dari gerakan sosialnya, salah satu pendekatan teoritis yang menonjol adalah *Resource Mobilization Theory* (Teori Mobilisasi Sumber Daya). Teori ini berfokus pada aspek struktural dan organisasi dalam proses pembentukan gerakan sosial, dengan menekankan pentingnya kemampuan aktor dan organisasi gerakan dalam mengakses dan mengelola sumber daya arena kompetisi dalam hal ini sering disebut daerah pemilihan.

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh John D. McCarthy dan Mayer N. Zald dalam tulisannya yang berjudul “*Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*” yang diterbitkan oleh *American Journal of Sociology* pada tahun 1977, tulisan ini merupakan respon terhadap teori-teori klasik gerakan sosial yang terlalu

menekankan pada aspek psikologi massa, seperti ketidakpuasan, deprivasi, dan keyakinan ideologis, mereka menilai pendekatan tersebut mengabaikan aspek-aspek struktural dan organisasi dari gerakan sosial.

McCarthy dan Zald menggunakan pendekatan yang menganggap bahwa gerakan sosial tidak muncul semata-mata karena adanya ketidakpuasan atau deprivasi, tetapi karena adanya organisasi yang mampu mengakses sumber daya (uang, tenaga kerja, dan jaringan), mengorganisir massa dan membentuk struktur kepemimpinan, kemampuan membangun sinergitas dengan pihak eksternal termasuk elite, media, dan organisasi pendukung serta memilih strategi taktis yang tepat dalam situasi politik tertentu.

Teori ini juga mengenalkan tiga konsep yang saling berkaitan satu sama lain, **1) *Beneficiaries*** yaitu kelompok yang menjadi sasaran manfaat gerakan; **2) *Constituents*** yaitu individu atau organisasi yang memberikan dukungan (dana, tenaga, legitimasi); **3) *Conscience Constituents*** yaitu pendukung dari luar yang tidak menerima manfaat langsung dari gerakan, namun tetap berkontribusi karena alasan moral dan solidaritas.

Dalam teori ini mengajukan hipotesis antara lain; semakin besar sumber daya yang tersedia di masyarakat, maka semakin berkembang sektor gerakan sosial. Dengan menempatkan organisasi dan sumber daya sebagai fokus utama teori mobilisasi sumber daya memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bagaimana gerakan sosial dapat terbentuk, bertahan, dan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, teori ini sesuai untuk digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian mengenai strategi pemenangan caleg perempuan pada pemilu 2024 dikarenakan perlu adanya organ yang dikelola secara terstruktur dan terorganisir untuk meraih tujuan yang diinginkan.

Strategi kampanye adalah bentuk khusus dari strategi politik yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, agar dapat

mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat. (Schroeder,2010), dalam sistem negara demokrasi terbuka, perebutan kekuasaan dan peluang untuk merebut pengaruh dilakukan melalui pemilu yang demokratis. Hal ini bertujuan untuk memperoleh bagian suara yang cukup dalam perebutan kursi.

Strategi ofensif adalah strategi memperluas pasar dan menembus pasar (Schroeder,2010) yang memiliki makna bahwasanya seorang politisi yang bertarung perlu untuk melakukan invasi daerah yang menjadi ceruk pemilih lawan politiknya. Bentuk yang tertinggi dari kepemimpinan adalah menyerang strategi musuh, yang terbaik kedua adalah mengacaukan persekutuanannya; yang terbaik berikutnya adalah menyerang tentara musuh dan kebijakan yang paling buruk adalah mengepung kota-kota berbenteng. (Sun Tzu,2003).

Untuk menyerang strategi lawan penting untuk mengenali terlebih dahulu strategi mereka. Oleh karena itu, memperoleh informasi dari pihak lawan menjadi suatu hal yang mahal dari sebuah pertarungan politik. Dalam strategi ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru. Oleh karenanya penawaran baru atau penawaran yang lebih baik perlu menjadi alternatif ketika pertarungan sedang berlangsung.

Menurut Laswell (1935) dalam bukunya *Politic : Who gets What, When and How?* Kurang lebih menjelaskan bahwasanya memasuki arena politik praktis politic is about take and gift. Jika tidak memperoleh informasi dari strategi pilitik lawan atau informasi yang valid, maka struktur kekuatan yang telah dibangun oleh lawan politik perlu diganggu dalam pergerakannya, dengan cara diurai kekuatannya terutama pada hubungan struktur jaringan sosialnya. Hal yang dapat dilakukan ialah dengan cara merusak kredibilitas lawan politik dengan membuat tawaran yang lebih menarik.

Strategi Defensif digunakan seorang politisi untuk mempertahankan basis pemilih mayoritasnya, strategi ini terbagi menjadi dua metode yaitu

dengan cara mempertahankan pasar dan/atau melepas atau menyerahkan pasar yang diharapkan mampu membawa keuntungan. (Schroeder,2010) Strategi Campuran dalam keadaan tertentu, suatu partai bisa saja menerapkan strategi ofensif dan strategi defensif sekaligus. Meskipun secara strategis keputusan ini selalu berisiko, tapi adakalanya cara ini membawa keberhasilan yang signifikan.

Tabel 1. 3 Strategi Campuran

STRATEGI CAMPURAN	
Strategi Ofensif	Strategi Defensif
Strategi memperluas pasar (strategi persaingan)	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan)
Strategi menembus pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup/menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar)

sumber: Schröder, P. (2010). Strategi Politik (3rd ed.).

1.6.3 Kandidat Efek

Teori kandidat efek menjelaskan bahwa karakteristik personal kandidat politik seperti penampilan, kepribadian, rekam jejak, cara bicara, dan gaya berkomunikasi dapat memengaruhi keputusan pemilih secara signifikan bahkan melebihi pertimbangan terhadap program atau ideologi partai. Dalam sistem pemilihan proporsional terbuka teori ini sangatlah relevan dikarenakan pemilih memilih sosok kandidat yang akan dipilih secara langsung berbeda dengan sistem pemilihan proporsional tertutup.

Dalam kajian perilaku pemilih, aspek visual kandidat menjadi salah satu faktor non-substansial yang terbukti memiliki pengaruh electoral. Markus Klein dan Ulrich Rosar (2017), dalam The SAGE Handbook of Electoral Behavior, menekankan bahwa daya tarik fisik

kandidat dapat memengaruhi preferensi pemilih, terutama di kalangan pemilih yang memiliki tingkat pengetahuan politik yang rendah.

Kandidat yang menarik secara fisik umumnya dinilai lebih positif dan lebih mungkin mendapat suara dibandingkan kandidat yang kurang menarik. Daya tarik fisik dapat berfungsi sebagai *heuristic cue* atau petunjuk heuristik, terutama dalam kondisi keterbatasan informasi. (Klein & Rosar, 2017). Pengaruh daya tarik fisik (*attractiveness*) dalam persepsi sosial dan perilaku pemilih dalam konteks politik terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a) **Attractiveness Consensus** yang merujuk pada kesepakatan umum atau konsistensi penilaian antar individu mengenai siapa yang dianggap menarik secara fisik. Kesepahaman ini terbentuk karena adanya standar estetika secara universal, dalam konteks pemilu kandidat yang dinilai menarik oleh sebagian besar pemilih akan memiliki keuntungan electoral yang luas karena persepsi tersebut relatif konsisten.
- b) **Attractiveness Attention Boost** yaitu daya tarik fisik meningkatkan perhatian yang diberikan seseorang terhadap individu tersebut, baik dalam bentuk tatapan mata atau melihat seseorang melalui gambar/foto, kandidat yang lebih menarik cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian di media, baliho, atau media sosial dibanding kandidat lain. Dalam kampanye politik, ini dapat memberi keuntungan eksposur yang besar terutama di era visual seperti sekarang, di mana pemilih sering mendapatkan paparan gambar kampanye.
- c) **Attractiveness Glamour Effect** yaitu kesan glamor yang diasosiasikan dengan kandidat yang tidak hanya menarik secara fisik, tetapi juga memancarkan citra elegan dan modern, misalnya kandidat yang memiliki penampilan yang anggun dengan busana tertentu di baliho yang menandakan keberadaan kelas dan juga aura

kewibawaan. Efek ini dapat menimbulkan citra positif dengan segmen pemilih tertentu, namun dapat menimbulkan stereotip negatif seperti hanya dianggap menjual tampang atau nirsubstansi, terutama bagi kandidat perempuan.

- d) **Attractiveness Stereotype** yaitu adanya asumsi sosial bahwa yang menarik secara fisik juga memiliki sifat-sifat positif lainnya, seperti cerdas, kompeten, jujur atau dapat dipercaya. Seorang kandidat dianggap menarik dianggap lebih pintar atau lebih layak dipilih meskipun pemilih belum mengetahui rekam jejaknya. (Klein & Rosar, 2017)

Menurut Samuel L. Popkin dalam bukunya *The Reasoning Voter: Communication and Persuasion in Presidential Campaigns* (1991) buku ini menginspirasi perilaku pemilih di era media visual yang menjelaskan bahwa pemilih bukanlah makhluk pasif atau irasional, melainkan pemilih rasional terbatas (*bounded rational*). Mereka menggunakan heuristik atau *shortcut* informasi untuk membuat keputusan dalam memilih kandidat dalam kondisi keterbatasan waktu, energi, dan informasi. Hal tersebut diistilahkan dengan “*gut rationality*” yaitu keputusan yang cepat namun masuk akal berdasarkan kesan, intuisi, dan pengalaman pemilih dengan kandidat.

Tipe pemilih yang rasional terbatas tidak selalu menganalisis platform program atau ideologi partai yang kandidat tawarkan akan tetapi lebih terhadap citra kandidat, asosiasi simbolik (agama, etnis, gender, profesi) dan peristiwa ikonik (gestur kampanye). Contoh peristiwa yang relevan yaitu ketika Gerald Ford (Presiden AS ke-38) kehilangan simpati di Texas karena terlihat menggigit tamale (makanan tradisional) dengan cara yang salah alhasil menimbulkan kesan bahwa dia tidaklah memahami budaya lokal.

Di era digitalisasi tentunya jejak digital sangatlah memengaruhi kandidat ketika sedang berkompetisi dalam politik elektoral. Media memiliki peran penting dalam menciptakan *visual cues* dan narasi singkat yang membentuk persepsi. Menurut Popkin (1991) kampanye haruslah memberi stimulus personal dan mengandung narasi dekat dengan pemilih. Interaksi antara kandidat dengan pemilih sangatlah berpengaruh untuk mendapatkan simpati publik dalam politik elektoral. Studi terhadap rangkaian hasil pemilu aktual menunjukkan keberhasilan kandidat dan partai secara signifikan dan substansial terkait dengan penampilan visual kandidat seperti di Jerman, Finlandia, Prancis, Irlandia, Swiss, Inggris, Australia, dan Kanada. (Klein & Rosar, 2017)

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

Konsep/Variabel	Dimensi	Indikator Empiris	Sumber Data
I. Interseksionalitas (Irisan identitas yang menciptakan hambatan berlapis)	A. Gender & Agama/Kultural	1. Munculnya isu atau <i>black campaign</i> yang menyerang gender dan/atau religiusitas kandidat (misalnya, isu non-hijab).	Wawancara (Tim Pemenangan, Tokoh Masyarakat) , Dokumentasi (Spanduk/Baliho responsif)
		2. Strategi adaptasi visual (penggunaan hijab) atau delegasi representasi di basis pemilih yang sensitif.	Wawancara (Kandidat, Koordinator Wilayah) , Dokumentasi
	B. Status Non-Petahana	1. Keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial, politik, dan jaringan yang didominasi oleh lawan petahana.	Wawancara (Kandidat, Tim Pemenangan)

Konsep/Variabel	Dimensi	Indikator Empiris	Sumber Data
		2. Strategi mempertahankan loyalitas basis dengan penyaluran program dan kunjungan rutin selama periode non-jabatan (2019-2024).	Wawancara (Tokoh Masyarakat, Caleg Partner), Analisis Dokumen (Laporan kegiatan/timelin e)
	C. Status Non-Putra Daerah	1. Taktik lawan politik yang menggunakan sentimen primordialisme untuk delegitimasi.	Wawancara (Tim Pemenangan, Tokoh Masyarakat)
		2. Strategi konstruksi identitas kekeluargaan menggunakan <i>tagline</i> berbahasa lokal (<i>Sedulur Dewek, Sedulur Selawase</i>).	Dokumentasi (Kartu nama/spanduk/A PK)
		3. Adaptasi kultural yang disengaja (belajar bahasa, <i>toto-kromo</i>) dan kehadiran fisik intensif untuk membangun kedekatan.	Wawancara (Kandidat, Tim Pemenangan)
II. Strategi Pemenangan (Respons taktis terhadap hambatan interseksional)	A. Strategi Ofensif	1. Pembentukan tim organik untuk merebut (<i>menyerang</i>) <i>swing voters</i> atau kantong suara lawan yang tidak terawat.	Wawancara (Tim Pemenangan), Analisis Dokumen (Mekanisme Kerja Relawan Wilayah)
		2. Implementasi sistem <i>tandem</i> (kemitraan) dengan caleg lokal untuk efisiensi <i>resource mobilization</i> dan penetrasi wilayah.	Wawancara (Caleg Partner), Dokumentasi (Daftar Caleg Partner)
	B. Strategi Defensif	1. Implementasi sistem pengamanan suara berlapis (saksi internal, partai, tim monitoring) dan <i>real quick count</i> .	Dokumentasi (Anggaran Saksi, Laporan Pelatihan Saksi)

Konsep/Variabel	Dimensi	Indikator Empiris	Sumber Data
		2. Perawatan loyalitas basis melalui kegiatan berkelanjutan (<i>in touch with people</i>)	Wawancara (Kandidat), Dokumentasi (Laporan Kegiatan)
III. Kandidat Efek (Karakteristik personal kandidat)	A. Daya Tarik Personal	1. Daya tarik fisik (<i>attractiveness consensus</i>) sebagai <i>heuristic cue</i> (jalan pintas) bagi pemilih (terutama <i>peripheral voters</i>).	Wawancara (Tim Pemenangan, Tokoh Masyarakat)
		2. Persona yang membumi (<i>gut rationality</i>) dan mudah beradaptasi (mau <i>ndeprook/lesehan</i>) untuk mengurangi jarak sosial.	Wawancara (Kandidat, Tim Pemenangan), Observasi/Dokumentasi Foto
	B. Komitmen	1. Integritas dan komitmen kandidat dalam menepati janji logistik dan keuangan kepada tim internal.	Wawancara (Tim Pemenangan, Relawan)
		2. Ketepatan waktu dan transparansi dalam penyediaan sumber daya sebagai fondasi loyalitas mesin politik.	Wawancara (Koordinator Wilayah)

1.8 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian mencakup langkah-langkah konkrit dari awal hingga akhir penelitian (Creswell,2014). Inti dari sebuah metode penelitian terletak pada proses pengumpulan data (Arikunto,2010)

1.9 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk dapat memahami secara mendalam strategi yang dilakukan oleh calon legislatif

perempuan (Amelia Anggraini) pada pemilu 2024. Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara intensif peristiwa dan proses yang terjadi dalam konteks spesifik dan memfokuskan kajian pada konteks tertentu, yaitu strategi kampanye caleg perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di dapil VII Jawa Tengah (Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara). Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan dan menginterpretasi makna dari fenomena sosial berdasarkan pandangan subjek yang diteliti (Creswell, 2014).

Penelitian jenis studi kasus mengeksplorasi suatu sistem terbatas dan kontemporer (sebuah kasus) atau beberapa kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi, misalnya observasi, wawancara, audiovisual, dan dokumen atau laporan, dan kemudian menyajikan deskripsi serta tema-tema dari kasus tersebut. Unit analisis dalam studi bisa berupa beberapa kasus (studi multi situs) atau satu kasus Tunggal (studi dalam satu situs). (Creswell, 2013:97).

Penelitian studi kasus dimulai dengan identifikasi sebuah kasus spesifik. Kasus ini bisa berupa entitas konkrit, seperti individu, kelompok kecil, organisasi, atau kemitraan. Pada tingkat yang kurang konkrit, dapat berupa komunitas, pola hubungan, proses pengambilan keputusan, atau proyek tertentu (Yin, 2009).

Hal yang penting disini adalah mendefinisikan sebuah kasus yang dapat dibatasi atau dijelaskan dalam parameter tertentu, seperti tempat dan waktu. Biasanya, peneliti studi kasus meneliti kasus nyata yang sedang berlangsung agar dapat mengumpulkan informasi akurat yang tidak hilang oleh waktu. Satu kasus dapat dipilih atau beberapa kasus diidentifikasi agar dapat dibandingkan (Creswell, 2013:98). Pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis studi kasus dapat dilakukan untuk menggambarkan sebuah kasus yang unik, yaitu kasus yang secara khusus menarik dan perlu dideskripsikan serta dirinci, hal ini biasa disebut dengan *intrinsic case* (kasus intrinsik).

Ciri studi kasus kualitatif yang baik adalah bahwa studi tersebut menyajikan pemahaman yang mendalam tentang kasusnya. Untuk mencapai

hal ini, peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data kualitatif, mulai dari wawancara, observasi, dokumen, hingga konten audiovisual. Mengandalkan satu sumber data saja biasanya tidak cukup untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pendekatan analisis data dalam studi kasus dapat bervariasi. Beberapa studi kasus melibatkan analisis berbagai unit dalam satu kasus. Studi kasus sering kali diakhiri dengan kesimpulan yang dibentuk oleh peneliti mengenai makna keseluruhan dari kasus tersebut. Hal ini disebut sebagai “assertions” oleh Stake (1995) atau membangun pola dan penjelasan oleh Yin (2009). Hal ini merupakan pelajaran umum yang dapat dipetik dari pendekatan kualitatif jenis studi kasus.

1.10 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan topik Strategi Pemenangan Caleg pada Pemilu 2024 di dapil Jawa Tengah VII (Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara) atas nama Amelia Anggraini. Dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam *purposive sampling* peneliti menetapkan sendiri siapa yang akan dijadikan sumber data karena dianggap paling tahu dengan permasalahan yang diteliti. (Arikunto,2010) Individu dipilih karena mereka sengaja dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan penelitian dan fenomena sentral yang sedang dikaji (Creswell,2014). Terdapat beberapa subjek dalam penelitian ini yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai berikut:

- 1) Amelia Anggraini
- 2) Tim sukses
- 3) Tokoh masyarakat
- 4) Penyelenggara pemilu
- 5) Calon Anggota DPRD Kabupaten yang menjadi partner.

Tabel 1. 5 Daftar Informan

No.	Informan	Informasi yang diharapkan
1.	Amelia Anggraini (Caleg DPR RI)	a) Suatu hal yang melatarbelakangi Amelia Anggraini berkecimpung di dunia politik. b) Motif politik sebagai calon anggota legislatif perempuan mengikuti kontestasi pemilu 2024. c) Isu/program yang dijadikan <i>bargaining</i> politik ketika masa kampanye. d) Penggunaan media sosial dan metode komunikasi dengan pemilih. e) Tantangan dan hambatan selama menjalani rangkaian pemilu 2024. f) Bentuk mobilisasi sumber daya yang digunakan (jaringan, dana, organisasi) g) Bagaimana cara menempatkan diri (<i>personality</i>) sebagai seorang kandidat di lingkungan internal tim pemenangan maupun di lingkup eksternal ketika di lapangan.

No.	Informan	Informasi yang diharapkan
2.	Tim Pemenangan/ Tim Sukses	a) Struktur organisasi tim pemenangan b) Bagaimana mengorganisir sebuah tim pemenangan? Pembagian tugas tim (logistik, komunikasi, relawan) c) Metode/strategi pemenangan yang digunakan (ofensif, defensif, atau campuran) d) Basis wilayah yang menjadi target utama e) Metode pendekatan ke masyarakat untuk penetrasi (<i>door to door</i>, forum warga, media sosial, dll.) f) Tantangan dan hambatan yang ditemui selama rangkaian pemilu dan cara mengatasinya. g) Penggunaan media sosial dan alat kampanye. h) Peran tokoh masyarakat dan jaringan dalam menggalang suara.
3.	Tokoh Masyarakat	a) Apa yang menjadi <i>top of mind</i> jika mendengar nama Amelia Anggraini?

No.	Informan	Informasi yang diharapkan
		b) Faktor apa yang membuat tokoh/masyarakat untuk mendukung Amelia? c) Pandangan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik di daerah? d) Sejauh mana pengaruh dukungan tokoh terhadap pilihan masyarakat?
4.	Penyelenggara Pemilu	a) Data umum jumlah caleg perempuan dan yang lolos di dapil tersebut. b) Tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan selama pemilu. c) Apakah terdapat kasus diskriminasi/kekerasan berbasis gender dalam proses pemilu. d) Pandangan lembaga terhadap efektivitas kebijakan kuota 30%. e) Inisiatif apa saja yang dilakukan lembaga untuk mendukung keterwakilan perempuan.
5.	Caleg DPRD Kabupaten/Provinsi yang menjadi partner	a) Bentuk kerja sama dengan Amelia Anggraini dalam kampanye lintas level. b) Strategi sinergi antara caleg pusat dengan caleg daerah untuk menguatkan suara partai.

No.	Informan	Informasi yang diharapkan
		c) Bagaimana koordinasi logistik kampanye dan pembagian wilayah. d) Bagaimana nota kesepahaman antara kedua belah pihak yang dibangun. e) Dinamika yang terjadi selama rangkaian pemilu 2024.

Tabel diolah oleh penulis

1.10 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara secara langsung dengan narasumber, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang sudah tersedia sebelumnya, baik dalam bentuk dokumen, laporan atau arsip.

1.10.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, hal ini bertujuan agar data yang diperoleh relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi secara lisan

(Sugiyono,2018). Wawancara digunakan karena peneliti ingin menggali pendapat, sikap, atau pengalaman langsung dari responden sesuai dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, berupa dokumen tertulis, foto, gambar, dan karya-karya monumental. (Sugiyono,2018) Penekanan dokumen bisa berupa data tertulis atau visual yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.10.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri atas tiga tahap utama yang berlangsung secara bersamaan dan saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti menyaring data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan kutipan langsung dari narasumber.

3. Triangulasi Sumber

Validitas temuan akan diuji melalui proses triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi silang data yang diperoleh dari wawancara dengan Amelia Anggraini, tim suksesnya, tokoh masyarakat, dan data dokumentasi.

4. Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data ini adalah verifikasi data yakni proses memeriksa ulang temuan dengan kembali melihat data secara berulang agar kesimpulan yang diambil benar-benar valid dan dapat dipercaya.

1.11 Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menjunjung tinggi etika, seperti kejujuran, tidak merugikan subjek penelitian, dan tidak memalsukan data (Sugiyono,2018:413). Pentingnya integritas, kejujuran, dan penghormatan terhadap subjek penelitian. Prinsip-prinsip etika penelitian:

- a. *Informed Consent* berarti responden diberi penjelasan lengkap tentang tujuan, metode, dan risiko penelitian sebelum setuju berpartisipasi,
- b. *Confidentiality* atau kerahasiaan; data pribadi dan identitas responden dilindungi dan tidak disebarluaskan tanpa izin,
- c. *Non-Maleficence* atau tidak membahayakan; peneliti wajib memastikan tidak ada kerugian fisik, psikologis, atau sosial bagi partisipan,
- d. *Honesty* atau kejujuran adalah peneliti harus jujur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data,
- e. *Justice* atau keadilan; peneliti harus memperlakukan semua partisipan secara adil tanpa diskriminasi.